

Peran Pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu

Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid¹

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

1rifaatfarid@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the problems faced by the Community Empowerment Council (MPM) in carrying out community empowerment programs in TPST Piyungan, knowing the impact of community empowerment programs conducted by MPM in TPST Piyungan with knowing the role and participation of youth in community empowerment programs carried out by MPM at TPST Piyungan. This research uses descriptive qualitative method. The results showed problems faced by MPM came from the surrounding community who did not know the empowerment program in detail, impacts that occurred in the community were united in a community that had been scattered in several collectors groups and better understood their potential and youth who are members of the community empowerment facilitator play an active role in conducting empowerment programs.

Keywords: *Participation, Youth role, Community Empowerment*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dalam melakukan pendampingan komunitas pemulung yang dimulai dari identifikasi permasalahan, pelatihan teknologi informasi, pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan dan Pembangunan bak air untuk cuci tangan pemulung di sekitar wilayah TPST Piyungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan upaya pendampingan yang dilakukan oleh pemuda MPM di TPSP memperlihatkan adanya perubahan pola pikir kesadaran lingkungan, perilaku hidup sehat dan mengenal perkembangan teknologi informasi.

Kata Kunci: Peran Pemuda, MPM, Komunitas Pemulung.

Pendahuluan

Permasalahan sampah berbagai daerah di Indonesia memang tidak ada habisnya. Begitu pula yang dialami oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta semakin bertambah setiap tahun dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan timbunan sampah. Selain bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan timbunan sampah juga disebabkan oleh peningkatan aktivitas serta belum semua pihak mempunyai kemampuan maupun kemauan dalam mengelola sampah. Sementara itu, peningkatan timbunan sampah tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pembuangan sampah yang memadai sehingga menyebabkan kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Yogyakarta semakin menurun.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi dengan tujuan wisata dan pendidikan dari daerah luar Provinsi DIY atau dalam Provinsi DIY (Riyan Sanjaya, 2015). Hal tersebut menjadi salah satu pemicu adanya permasalahan sampah di Provinsi DIY karena banyaknya pendatang dari luar Provinsi DIY. Menurut (Budihadjo, 2006) permasalahan sampah sendiri merupakan masalah klasik yang terjadi di daerah perkotaan, khususnya di Kota Yogyakarta hingga saat ini masih dikembangkannya tentang penanganan dan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah haruslah mendapat perhatian yang khusus seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat di muka bumi. Akibat dari peningkatan jumlah penduduk tersebut, volume sampah meningkat dan melebihi batas dari daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya volume sampah di TPA adalah daya tampung atau lahan yang dijadikan TPA tidak bisa menampung kembali kapasitas sampah yang ada serta tidak adanya pengelolaan sampah yang tepat pada TPA tersebut (Budihadjo, 2006).

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tiga tempat pembuangan akhir, yakni TPST Piyungan, TPST Banyuroto dan TPST Baleharjo. TPST Piyungan menampung jumlah sampah terbesar karena merupakan tempat pembuangan sampah akhir bagi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kondisi TPA Piyungan kian lama kian memprihatinkan karena kapasitasnya sebagai lokasi penampungan akhir sampah sudah mengalami penurunan.

TPST Piyungan didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi

pada tahun 1996 dengan luas lahan 12,5 Ha kemudian diperluas menjadi 14 Ha. TPST Piyungan dikelola oleh Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1996 s/d 1999. Namun, dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sejak tahun 2000 pengelolaan TPST Piyungan dilakukan bersama oleh Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam wadah kerjasama Sekretariat Bersama Kartamantul. (Ardila, 2017). TPST Piyungan terletak pada cekungan dengan kemiringan bervariasi, curam, dan mendatar. Lokasi tempat TPST Piyungan berdiri terbentuk atas tanah ledok dengan jurang yang cukup dalam sebesar 40 m. Kedalaman air tanah berkisar antara 2-5-meter dengan lapisan tanah mengandung gamping. Luas keseluruhan TPST Piyungan sebesar 12,5 Ha dengan kapasitas volume sampah 2.7 juta m³. Saat ini TPST Piyungan merupakan tempat pembuangan akhir regional dari tiga Kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Sampah yang masuk ke TPST Piyungan berkisar antara 400-500 ton/hari dengan sistem pengelolaan sampah control landfill.

Sampah yang dikirim ke TPST Piyungan bisa mencapai 450-500-ton perhari. Kepala Seksi Persampahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Alam DIY, Sarjani, mengungkapkan dalam perhitungan terakhir volume sampah yang masuk setiap hari mencapai 450ton ke TPST ini, maka diperkirakan usia tempat pembuangan sampah akhir ini berakhir tahun ini.

Tabel 1. Volume Sampah di TPA Piyungan Tahun 2013 - 2018

No	Tahun	Jumlah (kg)
1	2013	116.390.909
2	2014	80.794.724
3	2015	111.032.545
4	2016	123.033.664
5	2017	130.826.234
6	2018*	94.831.783
Total volume sampah		656.909.859

Keterangan : 2017 = jumlah sampah dari Januari - Oktober 2018

Tabel 2. Rekapitulasi Sampah Bulanan TPST Piyungan Tanggal 1-31 Oktober 2018

No	Asal Daerah	Jumlah (Kg)	Persentase (%)
1	Kota Yogyakarta	8.395,900	46,16
2	Kabupaten Sleman	5,211,490	28,65
3	Kabupaten Bantul	2,306,430	12,68
4	Non Dinas Kota Yogyakarta	335,032	1,84
5	Non Dinas Sleman	287,920	1,58
6	Non Dinas Bantul	46,330	0,25
7	Insidental	1,606,890	8,83
JUMLAH		18,189,992	100

Sumber : Data Pengelola TPST Piyungan (2018)

Dari data tabel 1.2 tersebut diketahui volume sampah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun sempat menurun di tahun 2008 namun mengingat areal dan kapasitas TPA Piyungan semakin berkurang, maka sampah tetap menjadi permasalahan krusial yang harus segera ditangani. Pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah sampah. Oleh karena itu sudah saatnya setiap lapisan masyarakat bergerak dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu kegiatan pendampingan selama ini yang dilakukan oleh MPM diantaranya adalah pelatihan teknologi informasi, pendampingan penyusunan struktur komunitas pemulung TPST Piyungan yang bernama Makaryo Adi Ngayogyakarta atau Mardiko dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat untuk anggota Mardiko dikarenakan permasalahan kesehatan di lingkungan TPST Piyungan sejauh ini sangat memprihatinkan, terutama akses layanan kesehatan yang belum memadai bagi masyarakat TPST Piyungan saat ini masih terbatas sehingga MPM dirasa perlu melakukan pemberdayaan. Sebagai salah satu contoh melakukan kegiatan secara masif gerakan mencuci tangan sebelum makan, karena selama ini pemulung sesudah memulung sampah tidak mencuci tangannya langsung menyentuh makanan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

1. Menjaga kebersihan lingkungan
2. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;

3. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan dapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Penanganan sampah di D.I.Yogyakarta selain berdasarkan perda Kabupaten Bantul diatas juga harus berdasarkan pada perundangan Perda Daerah D.I.Yogyakarta No.3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada ayat 16 disebutkan bahawa sampah harus dipilah terlebih dahulu menurut jenis sampahnya menjadi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mudah terurai;sampah yang dapat digunakan kembali;sampah yang dapat didaur ulang; dan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut maka masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengelola sampah. Dari data sebelumnya diketahui bahwa volume sampah di TPST Piyungan sempat mengalami fluktuasi. Fenomena fluktuasi jumlah volume sampah disebabkan salah satunya karena perilaku masyarakat terhadap sampah sudah mulai berubah. Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya melakukan pengelolaan sampah mandiri, akan tetapi kemandirian dalam pengelolaan sampah ini belum menjadi gerakan yang massive sehingga belum dapat menurunkan jumlah volume sampah secara konsisten. Selain itu ilmu dan pengetahuan masyarakat sekitar TPST Piyungan dalam mengelola sampah masih sangat terbatas.

Berangkat dari perhatian tentang problematika tersebut para pemuda pelopor muhammadiyah yang terhimpun dalam majelis pemberdayaan masyarakat bergerak untuk melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan terhadap komunitas pemulung di sekitar wilayah TPSP Piyungan. Praktik amal yang dilakukan muhammadiyah kini telah mengalami perubahan. Praktik amal yang tidak sekedar memberikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan agama saja tetapi juga melakukan amal yang dapat memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat.

Konsep dan praktik amal usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah saat ini berbeda dari Muhammadiyah periode awal. Pada dekade belakangan Muhammadiyah tidak hanya berkuat pada definisi murni dari amal usaha di mana sebuah kegiatan sosial hanya berharap pahala akhirat saja namun lebih berorientasi membantu orang miskin, terpinggirkan, tertindas maupun terabaikan yang luput perhatian serius pemerintah maupun pihak swasta lainnya. Hal ini seperti yang dikatakan

oleh Said Tuhuleley, pimpinan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah periode 2005-2010, amal usaha Muhammadiyah dikelola sebagai industri jasa dan memprioritaskan dalam pemberdayaan rakyat miskin, sebagaimana Muhammadiyah pada periode awal ketika masih dipimpin KH Ahmad Dahlan (Tuhuleley, 2015). Penelitian ini ingin menganalisis tentang peran pemuda Muhammadiyah MPM dalam pemberdayaan masyarakat di TPSP Piyungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moloeng (2012) penelitian kualitatif adalah: “penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Ketua Paguyuban Pemulung di Piyungan dan observasi di TPST Piyungan sedangkan pada data sekunder diperoleh dari artikel atau jurnal yang memuat informasi relevan dengan penelitian yang akan dibahas serta melakukan dokumentasi secara resmi untuk memperoleh informasi. Dengan menggunakan beberapa teori yang berfungsi dalam mendukung temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Peneliti menggunakan teori peran dalam mendukung temuan di lapangan yakni peran pemuda sebagai fasilitator pemberdayaan. Teori partisipasi dan teori pemuda juga akan digunakan dalam mendukung temuan di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari berbagai sumber yang didapat dengan menggunakan teknik triangulasi dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Sehingga aktivitas yang dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. **Reduksi data** (data reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan gayanya. Dengan demikian, maka data yang sudah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan, (Sugiyono: 2013)

2. **Penyajian data** (data display).

Tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah reduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat disajikan berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Selanjutnya juga disarankan dalam penyajian data selain teks yang naratif dapat digunakan grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

3. **Penarikan kesimpulan** atau Verifikasi (conclusion drawing/ verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin juga menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif juga merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. (Sugiyono: 2013)

Hasil dan Pembahasan

Profil dan Sejarah

Sejak lahirnya pada 1912, inti dari gerakan Muhammadiyah sering diringkas dalam tiga kata: feeding (santunan dan pemberdayaan), schooling (pendidikan), dan healing (pengobatan dan penyehatan). Tiga gerakan inilah yang menyebabkan Muhammadiyah mampu memiliki 7.227 PAUD, TK, TPA, dan SD/MI; 2.915 SMP/ MTs, SMA/MA, dan SMK; 67 pesantren; 172 universitas, akademi, dan politeknik; 457 rumah sakit, klinik, dan poliklinik; serta 454 panti asuhan, rumah jompo, dan pusat rehabilitasi cacat (Maarif, 2012).

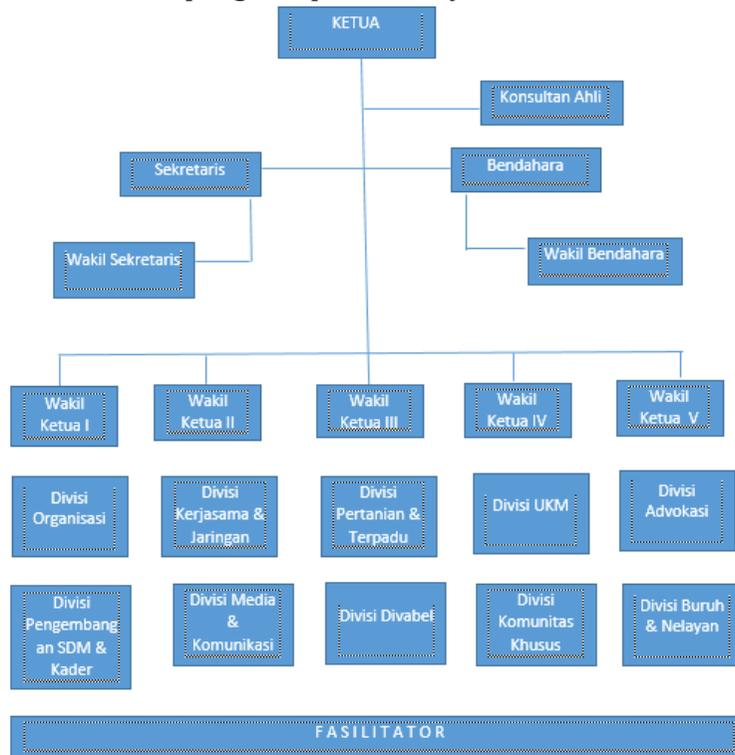
Setelah Mukhtar Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000, berdiri sebuah lembaga di lingkup Muhammadiyah yang menangani pemberdayaan masyarakat yang diberi nama Lembaga Buruh Tani dan

Nelayan (LBTN). Hasil Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005, menghasilkan perubahan nama lembaga menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sebagai upaya menggali dan mengangkat kembali prinsip yang melandasi gerak Muhammadiyah pada awal berdirinya. Hal ini sebagai upaya memaknai dan mengimplementasikan dalam bentuk gerakan sosial baru yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip dari gerakan Muhammadiyah yang hendak dibangkitkan kembali pasca Muktamar 2005 di Malang itu adalah humanisme non-sektarian. Muhammadiyah akan menolong sesama manusia tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Prinsip ini mengacu pada berbagai dokumen sejarah Almanak Moehammadiyah 1929 yang menyebutkan bahwa “pertolongan Moehammadiyah b/g PKO itoe, boekan sekali-sekali soeatoe djaring kepada manoesia oemoemnja, soepaja dapat menarik hati akan masoek kepada agama Islam atau perserikatan Moehammadiyah, itoe tidak akan tetapi segala pertolongannya itoe semata-mata karena memenoehi kewadajiban atas agamanja Islam terhadap segala bangsa” (Djarnawi Hadikusumo, 2010).

Prinsip dokumen tersebut diterjemahkan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), di bawah pimpinan pertamanya Said Tuhuleley pasca Muktamar tahun 2005 di Malang. Dalam bentuk pemberdayaan dan pertolongan kepada semua masyarakat tanpa memandang latar belakang agama dan golongan, diwujudkan dalam bentuk bantuan dan advokasi terhadap komunitas Syiah Sampang yang mengalami diskriminasi dan pengusiran. Ketika banyak lembaga filantropi yang enggan membantu Syiah karena dianggap sebagai komunitas sesat, Muhammadiyah tak ragu ikut membantu dan mendampingi mereka.

Di era globalisasi ini perkembangan zaman yang sangat pesat masih ada saja masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Muhammadiyah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) selama ini sangat gencar dalam membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah melalui pemberdayaan-pemberdayaan yang dilakukannya. Tupoksi MPM yang fokus dalam pemberdayaan dan pertolongan semua masyarakat diterjemahkan ke dalam struktur organisasi, dimana satu orang ketua dan 5 wakil ketua. Dalam melaksanakan tugasnya selain adanya beberapa divisi, juga terdapat konsultan ahli yang berperan sebagai pemberi masukan, pertimbangan maupun nasihat dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat. Adapun fasilitator menjadi garda terdepan MPM dalam melakukan program pemberdayaan.



Gambar 1. Struktur Organisasi MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kelompok Dampingan MPM PP

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah dalam melakukan program pemberdayaan dibantu oleh faktor pemberdayaan atau sering disebut dengan istilah faktor. Faktor ini berfungsi sebagai garda terdepan karena bersinggungan langsung dengan komunitas dampingan MPM PP Muhammadiyah dan berada di luar struktur periode kepengurusan. Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Qomaruddin, yang menyatakan bahwa faktor direkrut untuk membantu kinerja MPM, karena MPM mempunyai beberapa kelompok dampingan dan pengurus MPM juga mempunyai pekerjaan lainnya, maka direkrutlah faktor dengan dibuka pendaftaran secara umum siapapun boleh daftar, asalkan memenuhi syarat. Selama beberapa hari akan diberikan materi sesudah materi selesai diberikan maka rencana tindak lanjutnya adalah menjadi fasilitator pemberdayaannya MPM. (Wawancara Muhammad Qomaruddin, anggota divisi organisasi MPM, pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 22.00 WIB).

MPM mempunyai beberapa kelompok dampingan seperti

komunitas asongan, difabel, UKM, petani maupun pemulung sehingga dibutuhkan banyak tenaga fastor untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Dari tahun 2016-2018 telah dilakukan 2 kali pelaksanaan pelatihan fasilitator pemberdayaan bernama Sekam (Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang terbuka untuk umum guna menambah keberadaan fastor, karena fastor pada tahun sebelumnya dirasa kurang dan banyak diantaranya yang masih melanjutkan studi. Sekam I dilaksanakan pada 9-13 November 2016 di Kulonprogo Yogyakarta, dengan peserta sebanyak 54 dari berbagai perguruan tinggi se Indonesia maupun perwakilan dari organisasi masyarakat.

Setelah pelaksanaan Sekam I ini, banyak terjadi penambahan fastor baru khususnya 26 fastor dari 54 peserta berasal dari Yogyakarta dan disebar di kelompok dampingan MPM PP Muhammadiyah di wilayah Yogyakarta. Kinerja MPM PP Muhammadiyah menjadi lebih progresif karena bertambahnya tenaga baru. Pada tahun 2018, MPM PP Muhammadiyah kembali mengadakan Sekam ke II, yang dilaksanakan tanggal 5-11 September bertempat di Kalasan Sleman Yogyakarta. Peserta yang mengikuti Sekam II berjumlah 33 yang berasal dari Yogyakarta maupun daerah lain.

Rencana tindak lanjut Sekam II ini masih sama dengan Sekam I, akan tetapi Sekam II lebih difokuskan regenerasi fastor di tingkatan MPM PP Muhammadiyah, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya peserta yang berasal dari Jawa Timur maupun daerah lainnya dengan batas usia minimal 20 tahun dan minimal sedang menempuh kuliah semester 2.

Peran Fasilitator Pemberdayaan di TPST Piyungan Pembentukan Komunitas Pemulung Mardiko

Fastor yang telah selesai mengikuti Sekam akan ditempatkan di kelompok dampingan MPM PP Muhammadiyah, salah satunya di TPST Piyungan. Dalam melakukan pendampingan di TPST Piyungan terjadi banyak dinamika seperti saat pertama kali melakukan pendampingan, warga sekitar TPST Piyungan mengira akan ada upaya mengajak bergabung ke Muhammadiyah, padahal tidaklah demikian.

Waktu pertama kali masuk TPST Piyungan, memang ada penolakan dari warga setempat, ada yang mengira sebagai upaya Muhammadiyah-isasi. Bahkan ada yang mengira kami sebagai bagian dari ISIS (Islamic

State in Iraq and Syuriah) karena kerudung yang digunakan oleh fastor maupun pengurus MPM perempuan kebetulan memang panjang. Tetapi setelah berbagai langkah dialog yang persuasif, warga dan pengurus TPST Piyungan jadi terbuka dengan kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan (Wawancara Muhammad Qomaruddin, anggota divisi organisasi MPM, pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 22.00 WIB).

Awal tahun 2015, MPM dalam hal ini fastor maupun pengurus lainnya terlibat aktif untuk menyatukan pemulung di bawah satu wadah organisasi karena sebelum MPM masuk, pemulung masih mengikuti pengepulnya masing-masing, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Muhammad Qomaruddin, anggota divisi organisasi MPM, yang pertama kali kita lakukan pasca masuk ke TPST, adalah memikirkan bagaimana caranya agar pemulung ini bersatu dalam satu wadah. Karena pemulung sebelumnya masih terpencar-pencar mengikuti pengepulnya masing-masing. Setelah itu disepakati nama komunitas pemulungnya sebagai komunitas pemulung Mardiko (Makaryo Adhi Ngayogyakarta) (Wawancara Muhammad Qomaruddin, anggota divisi organisasi MPM, pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 22.00 WIB).

Setelah berhasil menyatukan pemulung dalam satu wadah komunitas, maka langkah selanjutnya adalah membentuk kepengurusan dan melakukan penguatan internal organisasi terlebih dahulu. Maryono adalah salah satu warga di sekitar TPST terpilih menjadi ketua Mardiko dibantu 8 pengurus lainnya yang meliputi wakil, sekretaris maupun bendahara.

Setelah struktur organisasi terbentuk, maka yang dilakukan MPM dan fastor adalah pendataan anggota. Setiap anggota akan didata dan dibuatkan kartu tanda anggota Mardiko. Anggota Mardiko kira-kira ada 500 pemulung yang terdaftar sebagai anggota berasal dari 15 pengepul. Total 15 pengepul yang 14 terdiri dari warga sekitar TPST, dan 1 orang pengepul berasal dari luar wilayah TPST. (Wawancara dengan Maryono, ketua Mardiko, pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 09.00 WIB).

Pada awal berdirinya Mardiko, pihak MPM dan Mardiko sempat melakukan audiensi dengan pengurus TPST untuk memperkenalkan diri untuk kembali meyakinkan pengurus TPST bahwa yang dilakukan oleh Mardiko ini tidak mengganggu kinerja pemungutan sampah, karena sempat ada kekhawatiran dari pengurus TPST seperti itu dan sebagai upaya untuk meminta bantuan kantor atau sekretariat yang bisa untuk digunakan.

Keterlibatan Aktif Fasilitator dalam Kegiatan Pemberdayaan Pelatihan TI bagi Anggota Mardiko

Pemberdayaan masyarakat pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah- langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005).

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat MPM bekerjasama dengan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyiyah Yogyakarta mengadakan pelatihan TI (teknologi informasi) kepada pemulung anggota Mardiko. Para pemulung dilatih secara dasar menggunakan komputer/laptop seperti membuat surat undangan menggunakan Microsoft Word, maupun mematikan dan menyalakan komputer. Hal ini dilakukan karena sebagai komunitas baru, perlu adanya pengenalan dasar komputer bagi seluruh anggota. Pelaksanaan pelatihan TI dilakukan tiap Sabtu malam sesudah sholat Isya selama 2 dari Januari-Februari 2017.

Kegiatan pelatihan ini selain sebagai pengenalan dasar komputer ke anggota Mardiko, ternyata sangat bermanfaat bagi para pemulung. Saat pelatihan berlangsung para pemulung selalu bertanya jika ada yang dirasa kurang paham. Dulunya pemulung tidak bisa mengoperasikan TI lalu dilatih oleh MPM untuk mengoperasikan TI, sekarang pemulung sudah bisa walaupun cuma sedikit. (Wawancara dengan Maryono, ketua Mardiko, pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 09.00 WIB).

Identifikasi Permasalahan Pemulung

Pertemuan rutin biasanya dilakukan selapan/35 hari untuk membahas dinamika kelompok maupun program yang akan dilakukan oleh MPM di TPST Piyungan. Fastor berperan aktif menyampaikan hasil rapat internal MPM yang rutin dilaksanakan setiap Sabtu sore. Pertemuan rutin Mardiko ini dihadiri oleh anggota Mardiko, pengepul, tokoh masyarakat yang berada di sekitar TPST Piyungan. Dalam pertemuan ini membahas mengenai masalah yang sedang dihadapi Mardiko maupun masyarakat. Masyarakat yang hadir juga membawa uang untuk iuran,

terutama iuran untuk mengisi bak air yang sudah dibangun oleh MPM bekerjasama dengan UMY maupun Lazismu DIY.

Pemulung di TPST Piyungan selain berasal dari warga setempat, ternyata banyak juga yang berasal dari berbagai daerah seperti Gunungkidul, Bantul, Yogyakarta, Kulonprogo Grobogan, Magelang, Klaten, Wonogiri, Blora, Riau, Flores, dan sebagainya. Sebagian pemulung yang sudah terdaftar melalui KTP berjumlah jumlah sekitar 453 orang dari total pemulung 600 orang, sebagaimana terlihat dalam tabel 5.3 berikut :

Tabel 3. Pemulung Mardiko yang mempunyai KTP

Daerah Asal	Jumlah	Daerah Asal	Jumlah
Gunungkidul	202	Klaten	6
Bantul	195	Wonoogiri	3
Kota Yogyakarta	17	Grobogan	3
Magelang	12	Flores	1
Riau	7	Blora	1
Kulon Progo	6	Jumlah 453	

Berdasar asal daerah dari sisi administratif, sebagian besar pemulung tidak mendapatkan akses program layanan kesehatan gratis meskipun memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional sebab umumnya pemulung tetap memilih fasilitas layanan tingkat pertama (FKTP) di daerah asal sesuai alamat di KTP. Fakta lain juga bahwa mulai 2016, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial bahwa pemulung tidak masuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga tidak berhak mendapatkan berbagai program dari pemerintah.

Pemeriksaan dan Penyuluhan Kesehatan bagi Anggota Mardiko

MPM PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan RS PKU Yogyakarta mengadakan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan gratis bagi anggota Mardiko dan pemulung sekitar TPST Piyungan. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu, 27 Maret 2017. Dalam pemeriksaan ini, melakukan pendampingan pemeriksaan golongan darah, gula darah, asam urat dan kolesterol. Pemeriksaan kesehatan ini diikuti kurang lebih 500 peserta.

Pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan ini dilakukan karena pola

hidup maupun pola makan pemulung yang tidak sehat. Hal ini tampak dari eringkali sesudah memulung sampah, pemulung tidak cuci tangan melainkan tangan hanya dibungkus plastik saja. Padahal di TPST juga banyak sapi yang berkeliaran, maupun sampah berserakan. Maryono Ketua Mardiko menjelaskan bahwa dulunya para pemulung banyak terserang penyakit diare, muntaber dan gatal-gatal sekarang sudah berkurang sekali.

Hasil yang diharapkan dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini adalah pemulung menjadi sadar akan pentingnya kebersihan, terutama mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Setiap hari pemulung bekerja di lingkungan yang kotor penuh tumpukan sampah, menghirup gas metan, sanitasi air yang buruk, ketersediaan air bersih sangat terbatas, sarana prasarana mandi cuci kakus (MCK) di lokasi kerja belum tersedia, dan sebagainya. Dengan kondisi seperti itu, penanaman menjaga kebersihan ini juga sebagai edukasi ke masyarakat sekitar TPST, meskipun sehari-hari berkutat dengan sampah menjaga pola hidup bersih tetap harus diutamakan.

Pembangunan Bak Air untuk Cuci Tangan Pemulung

MPM bekerjasama dengan LazisMu dan UMY melakukan pembangunan bak air untuk cuci tangan guna mendukung pentingnya budaya sadar kebersihan. Dibangun di atas tanah warga yang bersedia menyerahkan tanahnya. Dalam pengisian air, para pemulung yang tergabung dalam komunitas Mardiko iuran untuk beli air 1 truk. Biasanya 2 minggu sekali truk isi air akan datang dan mengisi bak cuci tangan tersebut. Para pemulung juga menggunakan air dari bak cuci tangan ini sebagai air wudhu.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Maryono bahwa bak cuci tangan ini sangat berguna sekali, dalam artian dulu pemulung makan hanya memakai tangan dibungkus plastik, dengan adanya padasan (bak cuci tangan) Alhamdulillah sekarang pemulung kalau makan tidak usah memakai plastik lagi, tetapi cuci tangan dengan memakai sabun. Lebih sehat dan lebih hemat.

Para pemulung setiap hari mengumpulkan sampah plastik, kertas/karton, botol dengan cara memungut di tumpukan sampah yang setiap hari masuk di TPST Piyungan. Dalam melaksanakan pekerjaannya ini, pemulung bercampur dengan ribuan ekor sapi yang mencari makan di

tumpukan-tumpukan sampah. Berdasarkan informasi dari Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, Bantul (Sekber Kartamantul), keberadaan pemulung dalam TPST Piyungan mempunyai kontribusi terhadap pengurangan volume sampah di TPS Piyungan sebanyak 4800 ton per tahun sehingga TPST Piyungan tidak cepat penuh. Fakta ini maka pemulung dikategorikan sebagai Pahlawan Lingkungan, mempunyai peran dalam mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir.

Kondisi itu sudah terjadi semenjak pemulung datang mengais rejeki di TPST Piyungan yaitu pada kisaran 15-22 tahun yang lalu. Dengan rutinitas pekerjaan tersebut dan jangka waktu yang sudah cukup lama, pemulung merasa bahwa kondisi kesehatannya tidak terganggu dan baik-baik saja. Padahal faktanya bahwa berdasar hasil diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat, selama ini banyak pemulung yang batuk tidak sembuh-sembuh, sesak nafas, gatal-gatal, sakit perut dan sebagainya. Bahkan tanggal 22 Maret 2017 ada pemulung yang meninggal disebabkan oleh diabetes yang tidak diketahui sebelumnya.

Kesimpulan

MPM melakukan pemberdayaan di TPST Piyungan dengan garda terdepannya melalui pemuda yang tergabung dalam fasilitator pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya, MPM secara perlahan berhasil merubah pola pikir masyarakat di sekitar TPST, antara lain dengan membiasakan diri cuci tangan, terbiasa menggunakan komputer secara dasar dan perilaku hidup sehat. MPM melalui fasilitator juga memfasilitasi pembentukan komunitas pemulung, komunitas yang dimaksud untuk mewadahi pemulung agar mudah MPM mudah dalam melakukan pemberdayaan. Tak dapat dipungkiri peran serta masyarakat juga mempunyai andil dalam keberhasilan program ini.

Daftar Pustaka

Ardila, R, 2017. Pengelolaan Sampah TPST Piyungan: Potret Kondisi Persampahan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Pengelolaan Lingkungan, Blok 2 TA 2017/2018

Budihadjo, M. A. 2006. Studi Potensi Pengoposan Sampah Kota Sebagai Salah Satu Alternatif Pengelolaan Sampah di TPA Dengan Menggunakan Ativator EM4 (Effective Microorganism), Jurnal Presipitasi:

Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan

Djarnawi Hadikusumo, 2010. Matahari-matahari Muhammadiyah, cetakan II, Yogyakarta: Penerbit Persatuan

Moloeng, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset

Nadhir Muhammad, 2009. Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat, Sidoarjo: Yapsem

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Riyan Sanjaya, S. R. 2015. Analisis Fungsi Dan Kenyamanan Jalur Pedestrian Kawasan Di Kota Pangkalan Bun

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Penerbit Citra Utama

Syamsul, Maarif. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Tuhuleley, Said, 2015. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance. Yogyakarta: Deepublish.

www.dlh.bantulkab.go.id/, Bantul Tahun 2016, Diakses pada 22 Mei 2018 pukul 07.30 WIB, melalui <https://dlh.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2017/03/IKPLHD%202016.pdf>

www.jogja.tribunnews.com/
<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/31/lipsus-sampah-semakin-menggunung-di-tpstpiyunga>

www.yogyakarta.bps.go.id/, Mei 2018 pukul 21.00 WIB, melalui http://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf_publicasi/StatistikDaerah-Istimewa-Yogyakarta-2016.